

PRIORITAS STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA: PENDEKATAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

STRATEGY PRIORITY OF DEVELOPMENT INDUSTRY IN REGENCY OF TASIKMALAYA: APPROACHING OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

Oleh:

**Fitranty Adirestuty¹, Muhammad Askha Refsanjani², Hilda Monoarfa³,
Kiki Hardiansyah⁴**

^{1,2,3,4} Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Jalan Dr. Setiabudhi no. 229 Bandung 40154 Jawa Barat

Email koresponden: fitranty@upi.edu¹, askharefsa@upi.edu², hildaborman@upi.edu³,
kikihardiansyah@upi.edu⁴

Sejarah Artikel: Diterima April 2023 Disetujui Mei 2023, Dipublikasikan Juni 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan prioritas strategi pengembangan industri makanan dan minuman halal di Kabupaten Tasikmalaya dengan menyajikan berbagai masalah-masalah dan solusi-solusi yang relevan dan valid. Adapun metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process dengan alat analisis Superdecision. Subjek dari penelitian ini adalah para ahli yang relevan dengan tujuan penelitian dari kalangan regulator, akademisi, dan praktisi. Total ada tujuh ahli yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah terbesar adalah dalam segi aspek adalah regulasi sedangkan dalam segi indicator adalah produsen makanan dan minuman masih kurang kepedulian serta kapastias mengenai kehalalan produk. Sedangkan prioritas aspek solusi yang paling tinggi adalah aspek infrastruktur halal dan dalam segi indicator adalah Pelatihan dan sosialisasi diberikan oleh Pemerintah kepada Industri Makanan dan Minuman Halal dan Bank Syariah melakukan promosi kepada industri makanan dan minuman halal mengenai produk pembiayaan syariah yang mudah diakses oleh perusahaan makanan dan minuman halal.

Kata Kunci: Strategi Pengembangan, Prioritas Masalah, Prioritas Solusi Industri Makanan dan Minuman Halal, Analytical Hierarchy Process

ABSTRACT

This research aims for finding the strategy of development the food and beverages industry in the Regency of Tasikmalaya with provide problems and solutions which are relevant and valid. Then, the method used in this research is Analytical Hierarchy Process with Superdecision as an analysis tool. The subject in this present research is the experts who are relevant to the research's purpose governor, academics, and practitioners. There are seven experts who are collected by the researcher. The results of the research indicate that the most problem in the aspect's dimension is regulation, on the other side, the most problem in the indicator dimension is that producers of food and beverages are less halal awareness and lack the capacity for halalness products. And then, the highest solution priority is the infrastructure aspect and there are two the highest solution priority in indicators which are Training and Socialization from Governor to Halal Food Beverages Industry and Sharia Bank is act for promoting on Food and Beverages Industry about credit of shariah which is acceptable.

Kata Kunci: Development Strategy, Problem Priority, Solution Priority, Food and Beverages Industry, Analytical Hierarchy Process

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri halal yang pesat telah menarik negara muslim maupun non-muslim untuk mengambil peluang dalam pasar tersebut. Diantaranya adalah Malaysia, Uni Emirat Arab, Brazil, Filipinan, China, dan Inggris dimana masing-masing negara memiliki produk unggulan (Katadata, 2020; Sukoso et al., 2020).

Fenomena pertumbuhan industri halal dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah pertumbuhan populasi muslim dunia (Ab Talib et al., 2020), permintaan terhadap kebutuhan produk halal yang tinggi (Awan et al., 2015), dan peningkatan kesejahteraan serta pendidikan di kalangan muslim dunia (Izberk-Bilgin & Nakata, 2016). Perbaikan kualitas pendidikan dan kesejahteraan mendorong kesadaran masyarakat muslim untuk menggunakan produk halal (Fathi et al., 2016).

Menurut Dinar Standard, industri makanan dan minuman halal merupakan industri yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya dengan angka 6.3% tiap tahunnya (Dinar Standard, 2019). Di sisi lain, Indonesia adalah negara di dunia yang paling besar tingkat pengeluarannya untuk makanan dan minuman halal sebesar 2.643 triliun rupiah (Dinar Standard, 2019). Walaupun begitu, Indonesia tidak menempatkan diri sebagai produsen makanan dan minuman halal, hal ini dapat dilihat dari data 10 daftar penghasil makanan dan minuman halal di dunia, tidak terdapat Indonesia didalamnya (Dinar Standard, 2019).

Sebenarnya, Indonesia dalam sektor makanan dan minuman halal memiliki potensi yang luar biasa baik dari tingkat nasional sampai daerah. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa sektor tersebut secara konsisten tumbuh memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020). Di tingkat daerah, seperti di Jawa Barat, sektor industri makanan dan minuman memiliki keunggulan diantaranya adalah menjadi lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak, jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan sektor industri lain, dan menjadi penyumbang paling besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2018).

Sementara itu, Kabupaten Tasikmalaya juga memiliki jumlah lapangan usaha makanan dan minuman paling besar dibandingkan dengan

sektor usaha lainnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 2021). Namun, dalam pengembangan sektor usaha makanan dan minuman halal masih stagnan dan dihadapi dengan berbagai permasalahan diantaranya adalah minimnya industri rumahan yang mendapatkan (P-IRT) dan yang memiliki label halal baru 15.000 produk atau sekitar 35-40% (Nurhasanudin, 2019).

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan ini diantaranya adalah penelitian Widiastuti et al. (2020) yang mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan dan rintangan dalam mengembangkan industri halal di Indonesia yaitu kebijakan pemerintah yang kurang mendukung, proses produksi dan pemasaran yang kurang optimal, infrastruktur halal masih sangat terbatas, kualitas sumber daya manusia masih minim. Amalia & Hidayah (2020) menambahkan bahwa lemahnya koordinasi dan kolaborasi antara sektor industri keuangan syariah dengan industri halal di sektor riil menjadi hambatan pengembangan industri makanan dan minuman halal. Tak hanya itu, produsen makanan dan minuman halal di Indonesia masih sulit untuk menerapkan logistik halal yang dikarenakan rendahnya komitmen persusahaan dan dukungan infrastruktur belum memadai (Susanty et al., 2021).

Sampai saat ini, penelitian mengenai konsumsi makanan halal di Indonesia masih rendah (Vanany et al., 2019), terlebih di Kabupaten Tasikmalaya belum ada yang membahasa mengenai strategi pengembangan industri makanan dan minuman halal. Sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian sebagai salah satu upaya dalam mengoptimalkan industri makanan dan minuman halal di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process yang memungkinkan untuk menetapkan aspek atau indikator mana yang memiliki prioritas paling tinggi dengan menghitung nilai-nilai subjektif dari para ahli. Metode ini sudah banyak digunakan untuk mengambil suatu keputusan di berbagai bidang, diantaranya di industri mesni, bisnis, lingkungan, kesehatan, dan pemerintahan (Sipahi & Timor, 2010). Metode yang dikembangkan oleh Saaty ini memiliki keunggulan diantaranya adalah AHP dapat membuat permasalahan kompleks menjadi model yang fleksibel (Syafnidawaty, 2020), dapat menggabungkan kriteria kualitatif dan kuantitatif (Sequeira et al., 2021), dan yang paling penting adalah konsistensi hasil penilaian

para ahli dapat diukur sehingga mengurangi bias dalam penelitian (Qubaisi et al., 2016).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan (Rinaldi & Mujiyanto, 2017). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) yang memungkinkan untuk mengombinasikan antara kualitatif dengan kuantitatif (Nugroho et al., 2018; Sequeira et al., 2021).

Metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty di tahun 1970-an dengan metode tersebut dapat membangun pengambilan keputusan masalah dalam berbagai hierarki seperti tujuan, kriteria, sub-kriteria, dan alternatif keputusan (Sipahi & Timor, 2010). Metode ini dinilai sebagai alat pengambilan keputusan yang efektif dikarenakan dapat mengurai suatu permasalahan yang kompleks menjadi sebuah hierarki. Selain itu juga, metode yang menyandarkan hasil penelitian ini pada para expert memiliki kelebihan yaitu terdapat pengukuran konsistensi terhadap pengambilan keputusan yang sudah dilakukan oleh expert (Qubaisi et al., 2016).

Adapun langkah-langkah untuk membuat keputusan yang menghasilkan prioritas dengan AHP adalah sebagai berikut (Saaty, 2008):

1. Mendefinisikan permasalahan dan menentukan jenis pengetahuan yang dicari.
2. Menyusun hierarki keputusan mulai dari atas terdapat tujuan keputusan tersebut dari perspektif yang luas, melalui tingkat menengah (kriteria dimana elemen-elemen selanjutnya bergantung) ke tingkat terendah (yang biasanya merupakan sekumpulan alternatif).
3. Membuat satu set matrik perbandingan berpasangan. Setiap elemen di atas level digunakan untuk membandingkan elemen pada level tepat dibawahnya dengan memerhatikan itu.
4. Menggunakan prioritas yang diperoleh dari perbandingan untuk menimbang prioritas dalam tingkat yang tepat dibawah. Lakukan ini untuk setiap elemen. Kemudian untuk setiap elemen di tingkat di bawah tambahkan nilai tertimbangannya dan dapatkan prioritas keseluruhan atau globalnya. Lanjutkan proses penimbangan dan penambahan ini hingga prioritas akhir alternative di tingkat paling bawah diperoleh.

Tahapan-tahapan dalam penelitian menggunakan metode AHP adalah sebagai berikut (Tanjung & Devi, 2013).

1. Konstruksi Model
Konstruksi model disusun berdasarkan literature review secara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan pada pakar, akademisis dan praktisi melalui indepth interview untuk mengkaji informasi secara lebih dalam untuk memperoleh permasalahan yang sebenarnya.
2. Kuantifikasi Model
Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner berupa pairwise comparison (perbandingan berpasangan) antar elemen cluster untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar tingkat kepentingannya dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9.
3. Analisis Hasil
 - a. *Geometric Mean*
Geometric Mean digunakan untuk mengetahui hasil penilaian dari para responden dan menentukan hasil pendapat pada suatu kelompok, Pertanyaan berupa perbandingan (*Pairwise Comparison*) dari akan dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsensus.
 - b. *Rater Agreement*
Rater Agreement adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1- Rn) terhadap suatu masalah dalam satu cluster. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur rater agreement adalah *Kendall's Coefficient of Concordance* ($W; 0 < W \leq 1$) $W=1$ menunjukkan kesesuaian yang sempurna. Untuk menghitung Kendall's (W), yang pertama kali dihitung adalah dengan memberikan rangking pada setiap jawaban kemudian menjumlahkannya.

$$R_i = \sum_j^m = 1r_{i,j}$$

Nilai dari rata-rata total rangking adalah Jumlah kuadrat deviasi (S), dihitung dengan formula:

$$R = \frac{1}{2} m = (n + 1)$$

Sehingga diperoleh Kendall's (W), yaitu:

$$S = \sum_{i=1}^n (R_i - R)^2$$

$$xW = \frac{12s}{m^2(n^2 - n)}$$

Jika nilai W=1, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian memiliki kesepakatan yang sempurna. Sedangkan ketika nilai W=0, maka

menunjukkan ketidaksesuaian antar jawab. Berikut merupakan tabel penilaian.

Tabel 1:

Penilaian Kendall's-Coefficient of Concordance

W	Interpretasi
0	Tidak ada Kesepakatan
0.10	Kesepakatan Lemah
0.30	Kesepakatan Sedang
0.60	Kesepakatan Kuat
1.00	Kesepakatan Sempurna

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Data Responden

Responden dalam studi ini adalah 7 expert dengan latar belakang regulator, akademisi, dan praktisi yang berpengalaman dan paham terhadap permasalahan penelitian

Tabel 2:

Responden Penelitian			
No	Nama Ahli	Instansi	Jabatan
1	Eni Hermalini	DISPERINDAG	Kepala Industri Makanan dan Minuman
2	Dina Sudjana	Pusat Halal ITB	Ketua Harian
3	Iman Ariyadi	STEI SEBI dan Universitas Islam Nusantara	Dosen
4	Yuny Erwanto	UGM	Dosen dan Peneliti
5	DadanR Shuhandan	Dinas UMKM	Staff UMKM
6	Prarito Wijiyanto	LPPOM	Kepala Bidang Sistem Jaminan Halal
7	Lady Yulia	BPJPH	Sub Koordinator Pengawasan LPH dan Auditor Halal

2. Diskusi

Berdasarkan hasil dari tinjauan pustaka dan wawancara dengan tujuh ahli, ditemukan lima aspek prioritas masalah dan solusi dari pengembangan industri makanan dan minuman halal. Adapun kelima aspek tersebut adalah regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur, pemasaran, dan keuangan syariah.

Dalam aspek regulasi, terdapat tiga indikator yang menjadi prioritas masalah, yaitu: 1) Belum terimplentasinya dengan baik mengenai Undang- Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, 2) Minimnya pemberian subsidi pajak dan insentif keuangan untuk industri makanan dan minuman halal, 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya belum fokus terhadap riset industri makanan dan minuman halal.

Kemudian dalam aspek sumber daya manusia terdapat dua indikator yang dihasilkan yaitu: 1) Produsen makanan dan minuman masih kurang kepedulian serta kapasitas mengenai kehalalan produk.; 2)

Masih sedikitnya jumlah auditor dan penyelia halal.

Sedangkan dalam aspek infrastruktur terdapat dua indikator masalah diantaranya adalah: 1) Sulitnya bagi produsen makanan dan minuman untuk mendapatkan sertifikasi halal; 2) Belum terintegrasinya logistik halal di lingkungan industri makanan dan minuman halal.

Adapun dalam aspek pemasaran terdapat tiga indikator yang menjadi permasalahan yaitu: 1) Industri makanan dan minuman halal kurang berinovasi dalam mengembangkan produknya; 2) Pemanfaatan *digital marketing* masih belum optimal; 3) Belum adanya kerjasama dengan setkor lain, seperti Pariwisata dan Media serta Rekreasi.

Selanjutnya, dalam aspek keuangan syariah atau aspek yang terakhir terdapat dua indikator yaitu: 1) Dukungan bank syariah dalam bentuk investasi pada industri makanan dan minuman halal masih rendah; 2) Belum masifnya pembiayaan dari Bank Syariah jika dibandingkan dengan Bank Konvensional terhadap industri makanan dan

minuman halal.

Selain aspek-aspek masalah, terdapat juga beberapa aspek solusi-solusi sebagai bentuk penyelesaian terhadap permasalahan yang ada.

Adapun aspek solusi yang pertama adalah aspek regulasi yang terdiri dari tiga indikator yaitu: 1) Sosialisasi sekaligus pengimplentasian secara menyeluruh UU Jaminah Produk Halal No 33 tahun 2014; 2) Pemberian subsidi pajak serta banutan insentif keuangan oleh Pemerintah kepada Industri Makanan dan Minuman Halal; 3) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengembangkan riset mengenai industri makanan dan minuman halal.

Dalam aspek selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia terdapat dua indikator solusi yaitu: 1) Pelatihan dan sosialisasi diberikan oleh Pemerintah kepada Industri Makanan dan Minuman Halal; 2) Memperbanyak jumlah auditor halal dan penyelia halal.

Sedangkan dalam aspek infrastruktur terdapat dua indikator solusi yaitu: 1) Pemerintah memberikan kemudahan bagi produsen makanan dan minuman halal untuk mendapatkan sertifikasi dan label halal serta perizinan usaha lainnya.

Aspek solusi yang ke-empat yaitu aspek pemasaran terdapat tiga indikator yaitu: 1) Perusahaan makanan dan minuman halal berinovasi pada produk sekaligus dalam memasarkannya; 2) Optimalisasi digital marketing dalam memasarkan produk industri makanan dan minuman halal; 3) Kerja sama dengan sektor lain seperti Pariwisata (Co-branding) dan sektor Media dan Rekreasi (Co-Marketing).

Aspek solusi terakhir yaitu aspek keuangan syariah terdapat dua indikator yaitu: 1) Dukungan bank syariah dalam bentuk investasi pada industri makanan dan minuman halal masih rendah; 2) Bank Syariah melakukan promosi produk pembiayaan syariah yang mudah diakses oleh perusahaan makanan dan minuman halal.

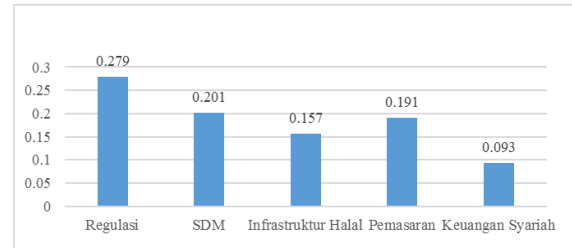
3. Hasil

Berdasarkan pada hasil pengolahan data dari tujuh responden kemudian menghasilkan prioritas-prioritas masalah, prioritas-prioritas solusi dan tingkat kesepakatan dari para responden terhadap penelitian. Adapun berikut sebagai

rinciannya:

a. Aspek Masalah

1) Geometric Mean Aspek Masalah Secara Umum



Gambar 1:
Geometric Mean (GMK) Masalah Secara Umum

Geometric Mean (GMK) Masalah Secara Umum Berdasarkan pada perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan terbesar terdapat pada aspek regulasi dengan nilai GMK sebesar 0.279, kemudian permasalahan terbesar kedua adalah aspek SDM dengan nilai GMK sebesar 0.201. Permasalahan terbesar ketiga adalah pemasaran dengan nilai GMK sebesar 0.191. Adapun tingkat kesepakatan para responden dalam aspek masalah secara umum mencapai nilai W sebesar 0.349.

Penemuan diatas sesuai dengan penelitian Widiastuti et al. (2020) yang mengungkapkan bahwa permasalahan terbesar dalam pengembangan industri halal di Indonesia adalah regulasi. Hal ini dikarenakan aspek regulasi dapat berdampak pada aspek lainnya, seperti undang-undang jaminan produk halal yang berdampak pada infrastruktur halal di Indonesia.

2) Geometric Mean Aspek Masalah Keseluruhan.



Gambar 2:
Geometric mean (GMK) Masalah Secara Keseluruhan

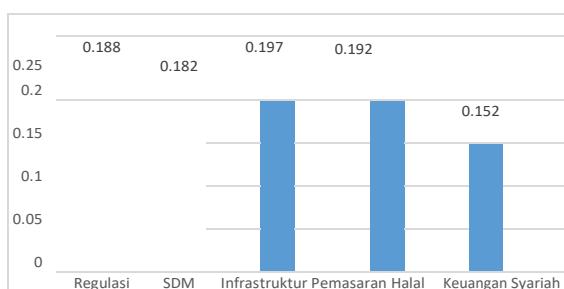
Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui dari 12 indikator masalah secara keseluruhan yang paling tinggi nilai GMk-nya dengan angka 0.115 adalah “Belum terintegrasinya infrastruktur halal di lingkungan industri makanan dan minuman halal”. Hal ini sekaligus menandakan bahwa indikator tersebut menjadi permasalahan yang paling utama. Sejalan dengan penemuan tersebut, penelitian Ab Talib et al. (2020) menyebutkan bahwa infrastruktur halal menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan industri halal suatu negara dikarenakan perannya vital yaitu sebagai fasilitas untuk distribusi, pergudangan, atau dengan kata lain salah satu yang menjamin kehalalan suatu produk.

Selanjutnya yang menjadi indikator masalah terbesar adalah “Belum terimplentasinya dengan baik mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014” dengan nilai GMk sebesar 0.101. Penemuan ini sejalan dengan penelitian Widiastuti et al. (2020) yang mengungkapkan bahwa dalam pengembangan industri halal di Indonesia, salah satu permasalahan terbesarnya adalah dalam pengimplentasian UU JPH Nomor 33 tahun 2014 yang disebabkan oleh masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada pihak-pihak terkait.

Indikator masalah “Dukungan bank syariah dalam bentuk investasi masih kurang” menempati urutan ketiga dengan nilai GMk sebesar 0.096. Hal ini juga sebagaimana penelitian Amalia & Hidayah (2020) yang menyatakan bahwa lemahnya koordinasi dan kolaborasi antara industri halal dengan keuangan syariah di Indonesia menjadi penghalang utama dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

b. Aspek Solusi

1) Geometric mean Aspek Solusi Secara Umum



Gambar 3:

Geometric mean (GMk) Aspek Solusi Secara

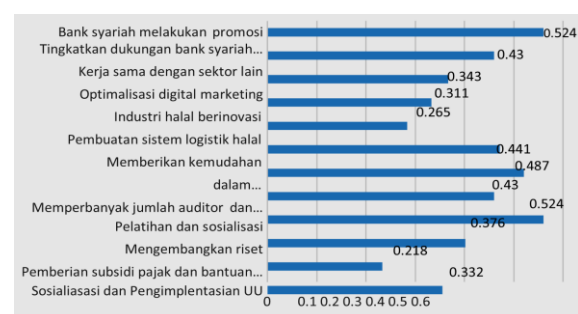
Umum

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa aspek solusi yang paling tinggi nilai GMk-nya dengan angka 0.197 adalah infrastruktur halal. Dengan kata lain, aspek tersebut menjadi prioritas solusi yang paling utama dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengembangan industri makanan dan minuman halal di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ab Talib et al. (2020) yang menyatakan bahwa infrasktruktur halal menjadi kunci atau tulang punggung dalam keberhasilan industri halal.

Penelitian Bashir et al. (2018) juga menambahkan bahwa penting bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur yang baik sehingga pengembangan di sektor industri makanan dan minuman halal dapat terwujud. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia juga menitikberatkan pada peran infrastruktur halal dalam Masterplan Ekonom Syariah Indonesia 2019-2024 (BAPPENAS, 2019).

Kemudian jika hasil perhitungan tersebut diurutkan dari nilai GMk terbesar sampai terkecil, maka yang pertama adalah infrastruktur halal, pemasaran, regulasi, SDM, dan keuangan syariah. Dengan nilai GMk masing-masing sebesar berikut: 0.197; 0.192; 0.188; 0.182; dan 0.152.

2) Geometric Mean Aspek Solusi Secara Keseluruhan



Gambar 4:

Geometric Mean Aspek Solusi Secara Keseluruhan

Hasil perhitungan indikator-indikator solusi secara keseluruhan mendapatkan dua indikator yang memiliki nilai tertinggi yaitu “Pelatihan dan sosialisasi diberikan oleh Pemerintah kepada Industri Makanan dan Minuman Halal” dan “Bank Syariah melakukan

promosi kepada industri makanan dan minuman halal mengenai produk pembiayaan syariah yang mudah diakses oleh perusahaan makanan dan minuman halal” yang memiliki nilai GMk yang sama yaitu sebesar 0.524 hal ini sekaligus menandakan bahwa kedua indikator tersebut menjadi prioritas solusi.

Kedua hal tersebut memiliki output yang berbeda. Pelatihan dan sosialisasi sangat diperlukan untuk menyiapkan SDM yang berkualitas dan unggul dalam menghadapi persaingan industri makanan dan minuman halal yang sangat ketat dengan negara lain. Dengan adanya SDM yang berkompeten, pengembangan industri makanan dan minuman halal di Indonesia akan cepat. Disisi lain, dukungan dari Bank Syariah diperlukan untuk mewujudkan integritas industri makanan dan minuman halal secara menyeluruh atau satu kesatuan antara sektor riil dan keuangan (BAPPENAS, 2019). Penelitian dari Amalia & Hidayah (2020) mengungkapkan bahwa industri keuangan syariah dapat membantu pertumbuhan industri halal.

c. Hasil Kesepakatan Para Ahli

1. Kesepakatan pada Aspek Masalah

Tabel 3:

Kesepakatan Para Ahli dalam Aspek Masalah		
Aspek	W	Keterangan
Regulasi	0.979	Kesepakatan Kuat
SDM	0	Tidak Ada Kesepakatan
Infrastruktur Halal	0.02	Tidak Ada Kesepakatan
Pemasaran	0.129	Kesepakatan Lemah
Keuangan Syariah	0.326	Kesepakatan Sedang
Keseluruhan	0.024	Kesepakatan Lemah
Umum	0.349	Kesepakatan Sedang

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa aspek regulasi memiliki tingkat kesepakatan yang kuat dengan kata lain para expert menilai aspek ini dengan nilai yang tidak jauh berbeda. Kesepakatan para expert pada aspek regulasi juga dibuktikan dengan aspek tersebut yang menjadi aspek yang paling bermasalah. Selanjutnya, untuk aspek SDM dan Infrastruktur Halal tidak terdapat kesepakatan atau jawaban para expert cenderung bervariasi. Adapun, aspek pemasaran dan keseluruhan kesepakatan para expert cenderung lemah. Sedangkan untuk aspek Keuangan Syariah dan Umum kesepakatan para expert cenderung sedang.

2. Kesepakatan pada Aspek Solusi

Tabel 4:

Kesepakatan Para Ahli dalam Aspek Masalah

Aspek	W	Keterangan
Regulasi	0.979	Kesepakatan Kuat
SDM	0	Tidak Ada Kesepakatan
rastruktur Halal	0.02	Tidak Ada Kesepakatan
Pemasaran	0.129	Kesepakatan Lemah
Keuangan Syariah	0.326	Kesepakatan Sedang
Keseluruhan	0.024	Kesepakatan Lemah
Umum	0.349	Kesepakatan Sedang

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa para expert memiliki kecenderungan kesepakatan kuat pada aspek Regulasi dengan nilai W 0.623. Kemudian, aspek SDM, Infrastruktur Halal, dan Umum para expert memiliki kecenderungan kesepakatan sedang. Adapun aspek-aspek lainnya yaitu Pemasaran, Keuangan Syariah, dan Keseluruhan tidak ada kesepakatan diantara para expert atau dengan kata lain hal ini menandakan variatifnya penilaian para expert yang memiliki latar belakang, pemahaman, dan pengetahuan yang berbeda satu sama lain.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini:

- 1) Masalah terbesar pada seluruh indikator aspek dalam pengembangan industri makanan dan minuman halal di Kabupaten Tasikmalaya adalah produsen makanan dan minuman masih kurang kepedulian serta kapastias mengenai kehalalan produk hal ini sejalan dengan penelitian Widiastuti et al. (2020) yang menemukan bahwa Sumber Daya Manusia menjadi masalah terbesar dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Adapun prioritas masalah secara keseluruhan para expert cenderung kesepakatannya lemah yang menandakan bervariasinya pendapat para expert.
- 2) Masalah terbesar pada seluruh aspek secara umum adalah regulasi dengan kata lain aspek tersebut memiliki peran dalam pengembangan industri makanan dan minuman halal yang sejalan dengan penelitian Bashir et al. (2018) dan Zailani et al. (2015) yang mengungkapkan bahwa

pemerintah memiliki peran dalam pengembangan industri makanan dan minuman halal baik secara regulasi maupun dukungan lainnya. Adapun kecenderungan para expert terhadap prioritas masalah secara umum mencapai kesepakatan sedang.

- 3) Prioritas solusi terbesar pada seluruh indikator aspek dalam pengembangan industri makanan dan minuman halal di Kabupaten Tasikmalaya adalah Pelatihan dan sosialisasi diberikan oleh Pemerintah kepada Industri Makanan dan Minuman Halal dan Bank Syariah melakukan promosi kepada industri makanan dan minuman halal mengenai produk pembiayaan syariah yang mudah diakses oleh perusahaan makanan dan minuman halal. Berkaitan dengan hal ini, terdapat penelitian terdahulu yang sejalan diantaranya adalah Bashir et al. (2018) yang mengungkapkan bahwa salah satu strategi untuk meningkatkan industri makanan dan minuman halal adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM. Disisi lain, terdapat penelitian Utomo et al. (2020) dan Amalia & Hidayah (2020) yang mengungkapkan bahwa keuangan islam dapat mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia. Sedangkan, para expert cenderung kesepaatannya terhadap prioritas solusi secara keseluruhan tidak mencapai kesepakatan atau dengan kata lain penilaian para expert terhadap prioritas solusi secara keseluruhan sangat beragam.
- 4) Prioritas solusi terbesar pada keseluruhan aspek secara umum dalam pengembangan industri makanan dan minuman halal di Kabupaten Tasikmalaya adalah aspek Infrastruktur halal. Hal ini sejalan dengan penelitian Zailani et al. (2015) yang mengungkapkan bahwa pentingnya sebuah negara yang ingin mengembangkan industri makanan dan minuman halal memiliki Halal Hub yang dimana seluruh pihak seperti badan sertifikasi halal, pemasok, penyedia logistik halal dan lain sebagainya dapat berkolaborasi. Kemudian, kecenderungan para expert terhadap prioritas solusi secara umum mencapai kesepakatan sedang.

Rekomendasi dari penelitian ini:

- 1) Bagi Pemerintah, diharapkan memasifkan program pemberdayaan

wakaf yang bertujuan untuk membangun infrastruktur. Dengan mempertimbangkan segala kebaikan yang timbul, pemerintah adalah pihak yang diharapkan untuk menjadi pihak yang paling kuat untuk menerapkan kebijakan ini dan akan mendapat banyak kebaikan seperti penghematan APBN dan meminimalisir dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

- 2) Bagi lembaga wakaf, diharapkan meningkatkan profesionalitas yang dianggap menjadi masalah sekaligus solusi yang paling baik untuk diselesaikan. Kebijakan ini dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan aset wakaf dan pengelolaan yang profesional dapat meningkatkan manfaat wakaf bagi warga negara Indonesia.
- 3) Bagi akademisi, diharapkan dapat mensosialisasikan dan juga mencerdaskan masyarakat terhadap pemanfaatan wakaf produktif untuk pengembangan infrastruktur. Agar ke depannya makin tinggi minat masyarakat untuk berwakaf sebagai bentuk ibadah maupun sebagai bentuk memajukan kesejahteraan umum.

Keterbatasan dari penelitian ini:

- 1) Lingkup penelitian yang terbatas hanya di Kabupaten Tasikmalaya.
- 2) Jumlah *expert* perlu ditambah, khususnya dari pihak-pihak yang berkaitan, seperti BPJPH dan Kemenag.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Talib, M. S., Pang, L. L., & and Ngah, A. H. (2020). The role of government in promoting Halal logistics: a systematic literature review. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0124>
- Amalia, E., & Hidayah, N. (2020). Strategies for Strengthening Halal Industries toward Integrated Islamic Economic System in Indonesia: Analytical Network Process Approach. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 77–102.
- Awan, H. M., Siddiquei, A. N., & Haider, Z. (2015). Factors affecting Halal purchase intention – evidence from Pakistan’s Halal

- food sector. *Management Research Review*, 38(6), 640–660. <https://doi.org/10.1108/mrr-01-2014-0022>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *PENDAPATAN NASIONALINDONESIA 2016-2020*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya. (2021). *Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2018). *Statistik Industri Besar dan Sedang Jawa Barat 2018*.
- BAPPENAS. (2019). *Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*.
- Bashir, K. M. I., Kim, J.-S., Mohibullah, M., Sohn, J. H., & Choi, J.-S. (2018). Strategies for improving the competitiveness of Korean seafood companies in the overseas halal food market. *Journal of Islamic Marketing*, 10(2), 606–632. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2018-0056>
- Dinar Standard. (2019). *State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020*. <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf>.
- Fathi, E., Zailani, S., Iranmanesh, M., & Kanapathy, K. (2016). Drivers of consumers' willingness to pay for halal logistics. *British Food Journal*, 118(2), 464–479. <https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2015-0212>
- Izberk-Bilgin, E., & Nakata, C. C. (2016). A new look at faith-based marketing: The global halal market. *Business Horizons*, 59(3), 285–292. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2016.01.005>
- Katadata. (2020). *Industri Halal untuk Semua*.
- Nugroho, T., Rusydiana, A. S., & Tubastuvi, N. (2018). Micro and Small Enterprises Financing Model Through the Revolving Fund Management Institution in Indonesia: Ahp Approach. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 3(2). <https://doi.org/10.30659/ijibe.3.2.496-504>
- Nurhasanudin, D. (2019). *Olahan Makanan di Tasik Masih Minim Izin dan Label Halal*. <https://www.ayotasik.com/read/2019/07/10/2830/olahan-makanan-di-tasik-masih-minim-izin-dan-label-halal>
- Qubaisi, A. Al, Badri, M., Mohaidat, J., Dhaheri, H. Al, Yang, G., Rashedi, A. Al, & Greer, K. (2016). An analytic hierarchy process for school quality and inspection: Model development and application. *International Journal of Educational Management*, 30(3), 437–459.
- Rinaldi, S. F., & Mujiyanto, B. (2017). *Metodologi Penelitian Dan Statistik. : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Sequeira, M. and Adlemo, A. (2021) 'AHP- based support tools for initial screening of manufacturing reshoring decisions', Journal of Global Operations an. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*.
- Sequeira, M., Hilletofth, P., & Adlemo, A. (2021). AHP-based support tools for initial screening of manufacturing reshoring decisions. *Journal of Global Operations and Strategic Sourcing*, 14(3), 502–527. <https://doi.org/10.1108/JGOSS-07-2020-0037>
- Sipahi, S., & Timor, M. (2010). The analytic hierarchy process and analytic network process: An overview of applications. *Management Decision*, 48(5), 775–808. <https://doi.org/10.1108/00251741011043920>
- Sukoso, A., Wiryawan, J., Kusnadi, J., & Sucipto, S. (2020). *Halal Industry Ecosystem (Ekosistem Industri Halal)*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Susanty, A., Puspitasari, N. B., Caterina, A. D., & Jati, S. (2021). Mapping the barriers for implementing halal logistics in Indonesian food, beverage, and ingredient companies. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 649–669.
- Syafnidawaty. (2020). *Kelebihan dan Kekurangan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)*.
- Tanjung, H., & Devi, A. (2013). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Gramata Publishing.
- Utomo, S. B., Sekaryuni, R., Widarjono, A., Tohirin, A., & Sudarsono, H. (2020). Promoting Islamic financial ecosystem to improve halal industry performance in Indonesia: a demand and supply analysis. *Journal of Islamic Marketing*, 12(5), 992–1009. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0259>
- Widiastuti, T., Rusydiana, A. S., Robani, A., Insani, T. D., & Muryani. (2020). Obstacles And Strategies In Developing Halal Industry: Evidence From Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(4), 398–406.

<https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8439>

Zailani, S., Kanapathy, K., Iranmanesh, M., & Tieman, M. (2015). Drivers of halal orientation strategy among halal food firms. *British Food Journal*, 117(8), 2143–2158.